

**ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 7 PADA  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBEANGAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ANGGI SEPTIANI HUTABARAT  
NIM : 11 833 0101**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/24

Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan

Nama Mahasiswa : ANGGI SEPTIANI HUTABARAT

No. Stambuk : 11 833 0101

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Dra. Hj. Rosmaini, Ak.,MMA)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus :

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/24



## ABSTRAK

### **Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 Pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7.

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan yang baik serta taat peraturan merupakan salah satu penerapan akuntabilitas suatu organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Aset tetap merupakan bagian dari neraca dalam laporan keuangan yang jumlahnya signifikan dalam suatu organisasi. Sehingga, setiap satuan kerja pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan-Peraturan yang terbaru, mulai dari pengakuan, penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, sampai dengan pengungkapan dan penyajian di laporan keuangan.

Dari Penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7.

***Kata Kunci : Pemerintah yang baik, Laporan Keuangan, Akuntansi Aset Tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, serta sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul **“ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO 7 PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN.”** Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis belumlah cukup untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan baik penggunaan bahasa maupun penyajian data. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, Mec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak informasi dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH selaku Ketua Penguji, dan Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM selaku Sekretaris tim penguji skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6. Orang Tua saya yang teramat saya cintai Djadiaman Hutabarat dan Bou tersayang Siti Halida, yang selalu memberikan dorongan baik moril dan materil serta selalu mendoakan anaknya agar dapat berhasil dengan baik.
  7. Bapak Pimpinan BBPPKI Medan beserta staf pegawai yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas pada penulis dalam melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
  8. Bapak /Ibu staf pengajar dan karyawan serta karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UMA.
  9. Abang Dan Kakak saya, Indra Halman Hutabarat dan Siti Laila Sari Hutabarat, dan Anissa Prawita Hutabarat, yang selalu memberikan semangat dikala kejenuhan menghampiri, yang selalu membuat penulis tersenyum dan menyakinkan saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
  10. Ria Devi Novita Sari, Dika Purwati, Indah Purnama Wati, Karina Amanda, Lili murnilawati, Umi Ani, dan Tiara yang begitu banyak memberikan masukan dan semangat. Selalu ada disaat sedih dan senang. Selalu menghibur dengan berbagai canda dan tawa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan rekan-rekan mahasiswa stambuk 11 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya.
- Demikianlah skripsi ini disusun dengan segala keterbatasan Peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Medan, Juli 2015

Peneliti

Anggi Septiani Hutabarat

Npm. 118330101



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEOROTIS</b>	
<b>A. Teori-Teori</b>	
1. Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap.....	6
2. Pengakuan Aset Tetap .....	8
3. Pengukuran Aset Tetap.....	8
4. Penilaian Awal Aset Tetap.....	9
5. Pengeluaran Setelah Perolehan.....	10
6. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal.....	10

a. Penyusutan Aset Tetap.....	10
7. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	15
8. Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap di laporan Keuangan	16
9. Kerangka Konseptual Penelitian.....	17

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	19
B. Definisi Operasional .....	20
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data .....	23

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	24
1. Sejarah singkat Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan .....	24
2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan .....	27
3. Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap.....	32
4. Pengakuan Aset Tetap .....	34
5. Pengukuran Aset Tetap .....	35
6. Penilaian Awal Aset Tetap.....	37
7. Pengeluaran Setelah Perolehan.....	38

8. Pengakuan Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal.....	39
a. Penyusutan Aset Tetap.....	39
9. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	41
10. Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan	42
<b>B. Pembahasan Penelitian .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap.....	44
2. Pengakuan Aset Tetap .....	44
3. Pengukuran Aset Tetap.....	45
4. Penilaian Awal Aset Tetap.....	46
5. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal.....	48
a. Penyusutan Aset Tetap.....	48
6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	51
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Daftar Aset Tetap .....	4
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	20
Tabel IV.2 Daftar Klasifikasi Aset Tetap .....	33
Tabel IV.3 Daftar Pembelian Aset Tetap.....	36
Tabel IV.4 Daftar Seluruh Aset Tetap BBPPKI .....	37
Tabel IV.5 Perhitungan Penyusutan & akumulasi peralatan dan mesin .....	40
Tabel IV.6 Perhitungan Penyusutan & akumulasi gedung dan bangunan...	40
Tabel IV.7 Perhitungan Penyusutan & akumulasi aset tetap lainnya .....	40
Tabel IV.8 Daftar Aset tetap yang tidak digunakan .....	42
Tabel IV.9 Neraca .....	43
Tabel IV.10 Penggolongan masa manfaat aset tetap .....	50
Tabel IV.11 Perbandingan PSAP No.7 Dengan Penerapan di Perusahaan ..	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II .1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	18
Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....	28





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pelaksanaan akuntabilitas pemerintah ialah dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan pemerintahan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun Laporan keuangan pemerintahan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan biaya dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintahan berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan pemerintahan di Indonesia. Standar Akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 12 (duabelas) pernyataan, yang salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 7 mengenai akuntansi aset tetap. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di ruang lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintahan daerah (Pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Laporan keuangan pemerintahan pusat pada umumnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Salah satu bagian dari laporan keuangan tersebut ialah Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu komponen dari neraca adalah aktiva yang dalam perinciannya terdiri dari aktiva lancar, investasi dan aktiva tetap.

Aset tetap merupakan suatu bagian aset kekayaan pemerintahan, dan bagian yang cukup signifikan dalam penyajian neraca. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Aset Tetap adalah aset berwujud yang masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan

untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik untuk mengontrol dan mengawasinya. Akuntansi aset tetap dapat dilakukan mulai dari perencanaan strategis dan operasional, pengakuan, penggunaan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, penghentian dan penghapusan, sampai dengan pengungkapan dan penyajian di laporan keuangan. Sehingga aset tetap sangat besar perannya dalam menggambarkan posisi aset yang dimiliki pemerintahan.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan (BBPPKI) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan (BBPPKI) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika. Melalui peran BBPPKI diharapkan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Dalam kegiatan operasionalnya Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan menggunakan Aset tetap yang bernilai cukup besar. Berikut tabel tentang jumlah nilai Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan.

Tabel I.1

## Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2012 dan 2013

No	Uraian Aset Tetap	Saldo Per	Saldo Per
		31 Des. 2012	31 Des. 2013
1	Tanah	Rp 305.640.000	Rp 845.542.650
2	Peralatan dan Mesin	Rp 2.115.244.772	Rp 2.249.435.772
3	Gedung dan Bangunan	Rp 1.952.613.631	Rp 1.952.613.631
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 25.927.800	Rp 40.762.900
6	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp (2.273.676.785)
7	Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>Rp 4.399.426.203</b>	<b>Rp 2.814.678.168</b>

Berdasarkan tabel di atas terdapat perubahan jumlah Aset tetap yang begitu besar dari tahun 2012 dan 2013, sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan pengetahuan teoritis dengan kenyataannya di lapangan, untuk itu peneliti memilih Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan Sebagai tempat penelitian, kemudian hasil penelitian dituangkan dengan judul **“Analisis Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: “Apakah akuntansi aset tetap pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7?”

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi aset tetap pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

#### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis, khususnya mengenai praktik akuntansi aset tetap di Pemerintahan.

#### 2. Bagi Perusahaan

Sebagai sumber masukan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan dalam pencatatan dan penerapan akuntansi aset tetap di perusahaan.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan khususnya penelitian yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap di pemerintahan dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori-Teori

##### 1. Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(2010;7-5) menyatakan:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum”.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (2010;7-8)

Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

##### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

##### 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya



signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12(duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

### 3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

### 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

### 5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan di manfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus disajikan di pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 2. Pengakuan Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (2010:7-16)

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud,
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas) bulan,
3. Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal,
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan  
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

## 3. Pengukuran Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7 (2010: 5:22) Pengukuran Aset Tetap dinilai dengan Biaya Perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai saat tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut di peroleh. Seperti aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap di dalam pemerintahan disebut juga dengan Barang Milik Negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, maupun barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **4. Penilaian Awal Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7 Paragraf 24 dan 25 menyatakan bahwa: “ barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai , biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh”.

## 5. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 7 (2010:8:50) “ Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.”

Kapitalisasi biaya yang dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan pengeluaran. Organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada.

## 6. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010:9:53) “Pengukuran aset tetap berikutnya terhadap pengakuan awal disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.”

### a. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah proses pengalokasian yang sistematis nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*). Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan yang untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode Penyusutan yang dapat digunakan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no 7 Antara lain:

- “ 1. Metode Garis lurus (Straight Line Method),  
 2. Metode Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method),  
 3. Metode Unit Produksi (Unit of Production Method).”

Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan (*depreciasi*) setiap periode antara lain:

#### 1. Harga perolehan (*Cost*)

Yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya yang terjadi dalam pemerolehan suatu aset dan menempatkannya agar dapat digunakan.

#### 2. Nilai Sisa (*Residu*)

Nilai sisa suatu aset yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya.

### 3. Taksiran umur

Taksiran umur kegunaan aktif dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini biasanya dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya.

Menurut Soemarsono, (2005 : 25) ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Dua faktor itu adalah nilai aktiva tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan ( dasar penyusutan) dan taksiran manfaat. Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, yaitu:

#### 1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode ini merupakan metode perhitungan yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh organisasi perusahaan. Cara ini memberikan beban depresiasi yang konstan pada setiap periode akuntansi selama masa manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung depresiasi dengan metode ini yaitu:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N}$$

Keterangan :

HP = Harga Perolehan Aset

NS = Taksiran Nilai Sisa

$N$  = Taksiran Umur Kegunaan/Ekonomis

## 2. Metode saldo menurun ganda (*double declining method*)

Pada metode ini, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini terjadi karena perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku (harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi) aset yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Metode ini merupakan metode depresiasi yang dihitung dengan mengalihkan nilai buku aset pada awal periode dengan dua kali tarif garis lurus. Nilai buku pada awal tahun pertama adalah sama dengan harga perolehan aset, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, nilai buku adalah selisih antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasi pada awal tahun. Berbeda dengan metode lainnya, pada metode ini nilai residu tidak diperhitungkan. Akan tetapi, nilai residu akan menjadi batas jumlah depresiasi yang akan dilakukan. Depresiasi akan berakhir apabila nilai buku telah mencapai jumlah yang sama dengan atau mendekati taksiran nilai residu.

Rumus untuk menghitung depresiasi dengan metode ini yaitu:

$$\text{Depresiasi} = N \times (100\% / nx2)$$

Keterangan:

$N$  = Nilai buku aktiva

$n$  = Taksiran umur ekonomis

## 3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Dalam metode suatu hasil, masa pemakaian aset yang tidak dinyatakan dengan jangka waktu, melainkan dengan jumlah satuan (unit) yang dapat

dihasilkan oleh aktiva yang bersangkutan. Metode ini cocok digunakan untuk depresiasi mesin pabrik, karena hasil suatu mesin dapat diukur satuannya. Metode ini dapat juga didasarkan pada jam kerja mesin atau jam kerja operator yang menangani mesin. Metode ini dapat digunakan juga untuk peralatan angkutan (diukur dengan jarak yang ditempuh) atau peralatan kantor tertentu (diukur dengan jam pemakaian). Namun demikian metode ini tidak tepat digunakan pada gedung atau mebel, karena untuk aktiva semacam ini depresiasi lebih merupakan fungsi waktu (bukan kegiatan), dan satuan hasilnya sukar untuk diukur. Oleh karena itu dalam metode ini yang perlu ditaksir adalah jumlah satuan hasil yang diperkirakan dapat dihasilkan oleh aset. Taksiran satuan hasil ini dipakai untuk membagi harga perolehan depresiasi, sehingga dapat ditentukan depresiasi pertahun hasil. Angka depresiasi per unit hasil ini kemudian dikalikan dengan jumlah satuan hasil sesungguhnya pada satu tahun, sehingga dapat di terapkan depresiasi untuk tahun yang bersangkutan.

Rumus untuk menghitung metode tersebut adalah hasilnya sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N}$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai sisa

N = Taksiran Jumlah Penggunaan Aktiva



## 7. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No 7 Paragraf 76-78), Suatu Aset tetap yang dieliminasi dari neraca dapat disebabkan tidak dapat digunakan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Beberapa hal yang penting dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan penghentian aktiva tetap adalah :

### 1. Aktiva tetap dibuang saja

Dalam hal ini akun aktiva tetap dan akumulasi penyusutan harus dihapuskan dengan mengkreditkan akun aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga perolehannya dan mendebet total penyusutan sampai saat penyingkirannya. Apabila ada nilai bukunya, maka dicatat sebagai kerugian atas pelepasan aktiva tersebut.

### 2. Aktiva tetap dapat dijual

Penyusutan yang terjadi selama periode antara tanggal ayat jurnal penyusutan terakhir dibuat dengan tanggal penjualan, nilai buku aktiva tersebut jika selisih dengan harga jual dapat di hitung laba atau rugi.

### 3. Aktiva tetap dapat ditukar

Prosedur penukaran aktiva tetap sama dengan prosedur perolehannya yang dilakukan melalui pertukaran.

#### 4. Dipakai diluar operasi normal perusahaan

Aktiva tetap tersebut dicatat atau digolongkan sebagai investasi. Contoh : Tanah yang dibeli yang tidak diperuntukan untuk bangunan di atasnya.

#### 5. Aktiva tetap di non-aktif kan

Aktiva yang tidak dipakai lagi dalam operasi perusahaan dicatat atau digolongkan sebagai aktiva lain-lain di neraca perusahaan dengan nilai nol yaitu harga dengan penyusutan atau dibulatkan Rp1.

### 8. Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP Nomor 07 paragraf 79) menjelaskan laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yakni :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai dan jika ada mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Secara umum Aset tetap perusahaan disajikan dalam laporan keuangan yaitu pada komponen neraca dan berada pada sisi aset. Sedangkan, menurut Harahap (2011:123), bentuk penyajian aktiva tetap di dalam neraca yang umumnya sering digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- a) Dalam neraca yang hanya mencantumkan nilai buku saja atau nilai *cost* aktiva tetap masing-masing dan kemudian dikurangi akumulasi Penyusutan secara global ;
- b) Informasi yang lebih lanjut dapat dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini dapat dibuat nilai *cost* masing-masing dan Akuntansi Penyusutan masing-masing.

## 9. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang analisis penerapan kebijakan akuntansi aktiva tetap pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan yang terdiri dari perolehan, penyusutan, penghapusan dan penghentian, sampai dengan penyajian aktiva tetap dilaporan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



**Gambar II.1 Kerangka Konseptual Penelitian**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Menurut Sunyoto Danang (2013:31) “ Penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan, yang beralamat di Jalan Tombak no.31 Medan 20222, Telp (061) 6639817.

##### 3. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan November 2014 sampai April 2015.

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan tabel waktu penelitian.

**TABEL III.1**  
**WAKTU PENELITIAN**

No	Kegiatan	TAHUN 2104								TAHUN 2015																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Pengajuan Judul				■																												
2	Penyusunan Proposal							■		■																							
3	Bimbingan Proposal												■																				
4	Seminar Proposal													■																			
5	Pengumpulan data dan analisis data														■																		
6	Penyelesaian Skripsi dan Bimbingan Skripsi																																
7	Seminar Hasil																																

## B. Definisi Operasional

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti untuk menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

### 1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan bagian yang cukup signifikan di dalam neraca satuan kerja pemerintah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Akuntansi aset tetap dapat dilakukan mulai dari perencanaan strategis dan operasional, perolehan, penggunaan, penyusutan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, penghentian dan pelepasan, sampai dengan pelaporannya di laporan

keuangan. Sehingga, aktiva tetap sangat besar peranannya dalam menggambarkan posisi aset yang dimiliki pemerintah.

## 2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sebuah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan kementerian-kementerianya maupun di pemerintahan daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Standar Akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 12 (dusbelas) pernyataan, yang salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 7 mengenai akuntansi aset tetap tentang definisi aset tetap, Klasifikasi aset tetap, Pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, Penilaian awal aset tetap, Pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, Penghentian dan Pelepasan aset tetap, dan Pengungkapannya.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2005 : 14), “Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya dan merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui pengamatan dan buku literature lainnya dan merupakan data yang berupa angka-angka”.

### 2. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

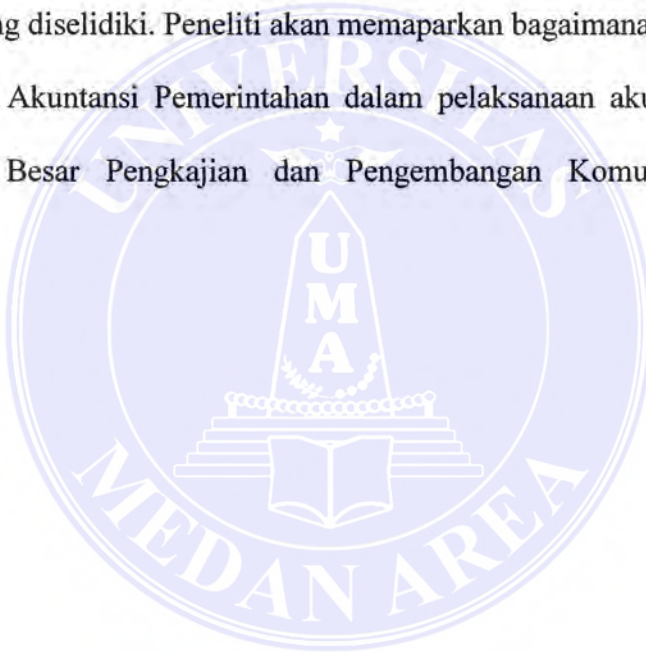
Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah:

1. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengelola keuangan, khususnya aktiva tetap di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
2. Dokumentasi yaitu pencarian informasi dengan cara melihat data-data yang terdapat dalam dokumentasi baik secara online maupun di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan.



## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Metode Deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Peneliti akan memaparkan bagaimana kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Balai Besar Pengkajian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan ini telah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan.
2. Pengeluaran yang terjadi pada aset tetap sudah di kapitalisasi sesuai dengan batasan-batasan yang telah dibuat oleh perusahaan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memberikan batasan yang pasti atas nilai kapitalisasi pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan setiap entitas dikarenakan beragamnya aktivitas entitas. Namun, dengan batasan-batasan kapitalisasi yang telah dibuat, perusahaan telah menerapkan standar akuntansi yang baik.
3. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan menerapkan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2013 Penyusutan aset tetap yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus, yang dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan telah mencatat nilai aset tetap sesuai dengan biaya perolehannya.

Dan mengembalikan aset tetap yang tidak digunakan lagi ke negara.

## B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Peneliti selanjutnya juga diharapkan melakukan penelitian dengan data tahunan serta peraturan yang terbaru (*up to date*) sehingga hasil yang didapat akan semakin akurat.
2. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikais dan Informatika Medan sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan mesin seperti komputer-komputer yang sudah tidak ekonomis lagi untuk diajukan Surat Permohonan Penghapusan Aset Tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Rusdi, 2004, **Akuntansi Pengantar**, UPP STIM YKPN, Jogjakarta.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, 2010, **Sistem Informasi Akuntansi**, Andi Jogjakarta, Jogjakarta.
- Giri Efraim Ferdinan. 2012. **Akuntansi Keuangan Menengah 1**, UPP STIM YKPN, Jogjakarta
- Hery dan Widyawati Lekok. 2011. **Akuntansi Keuangan Menengah 2**. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2012, **Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismail, 2010, **Akuntansi Bank**, Penerbit PT Kencana, Surabaya.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat**.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat**.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat**.
- Rudianto, 2012 **Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sunyoto Danang, 2013 **Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Cetakan Pertama**, Yogyakarta.
- Soemarso. 2005. **Akuntansi Suatu Pengantar Buku 2**. Edisi Kelima, penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2005 **Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesepuluh**, Alfabeta, Bandung.
- Warren, Carl S., et. al., 2005, **Accounting 21 Edition, Pengantar Akuntansi Edisi 21**, Penerjemah: Aria Farahmita, dkk., Salemba Empat, Jakarta.

<http://kemenag.go.id/file/file/PERATURANPEMERINTAH/uezj1347945756.pdf>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24